

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA.018
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026**

BRMP Sulawesi Tenggara
Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2026



II. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BRMP Sulawesi Tenggara

BRMP Sulawesi Tenggara didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai visi “Terwujudnya Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BRMP Sulawesi Tenggara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua yang didapatkan dari laporan SAKTI pada Modul GL dan Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara yang diperoleh dari Laporan SAKTI Modul Aset Tetap. SAKTI Modul GL dan Pelaporan dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SAKTI Modul Aset Tetap adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BRMP Sulawesi Tenggara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BRMP

Sulawesi Tenggara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2026 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BRMP Sulawesi Tenggara yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BRMP Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintahan Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	10 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar 28,281,048 atau mencapai 94% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar 30,154,000. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2026		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	10,000,000	16,100,000	161
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	20,154,000	0	0
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	10,626,048	

Uraian	2026		
Akun Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,555,000	
Jumlah	30,154,000	28,281,048	94

Realisasi Pendapatan TA 2026 adalah Mengalami Penurunan. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BRMP Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2026

Uraian	Realisasi 30 Juni 2026	Realisasi 30 Juni 2025	.%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	28,281,048	57,974,400	-51,22
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0,00	0,00	0,00
Jumlah	28,281,048	57,974,400	-51,22

Dibandingkan dengan Tahun 2025, Realisasi Pendapatan TA 2026 mengalami Penurunan dibandingkan realisasi pendapatatam pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Menurunnya penerimaan pada akun Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu, yang bersifat tidak berulang. Pada Tahun 2025 terdapat penerimaan pengembalian kelebihan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti untuk periode Januari sampai dengan Juni pada 6 pegawai BRMP Sultra. Sedangkan untuk periode semester I tahun 2026 hanya ada penerimaan pengembalian kelebihan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional untuk 1 pegawai BBRMP Sultra.

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2026 adalah sebesar Rp 6,769,929,730 atau 17% dari anggaran belanja sebesar Rp 40,961,882,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
30 Juni 2026

Uraian	2026		
Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	4,539,029,000	2,271,708,205	50
Belanja Barang	28,859,751,000	4,513,229,209	16
Belanja Modal	7,563,102,000	0	0
Total Belanja Kotor	40,961,882,000	6,784,937,414	17
Pengembalian Belanja	-	15,007,684	-
Total Belanja	40,961,882,000	6,769,929,730	17

Sedangkan perbandingan realisasi belanja TA 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut

Perbandingan Realisasi Belanja
30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	Realisasi 30 Juni 2026	Realisasi 30 Juni 2025	.%
Belanja Pegawai	2,271,708,021	1,970,722,605	+15,27
Belanja Barang	4,498,221,709	1,682,966,843	+167,28
Belanja Modal	0	0	
Total Belanja	6,769,929,730	3,653,689,448	+85,29

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2026 disajikan pada tabel berikut.

Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2026 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	5,518,605,000	1,303,019,000	23.61	0
Program Dukungan Manajemen	8,555,977,000	4,121,849,056	48.35	3,653,689,448
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	26,887,300,000	1,345,061,674	5	0
Jumlah	40,961,882,000	6,769,929,730	16.56	3,653,689,448

Dibandingkan dengan Tahun 2025, Realisasi Belanja TA 2026 mengalami Kenaikan dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya pembayaran kenaikan gaji berkala (KGB), kenaikan pangkat pegawai, serta pengangkatan CPNS menjadi PNS.
2. Adanya tambahan kegiatan pada Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas.
3. Meningkatnya alokasi anggaran kegiatan ICARE pada Tahun 2026
4. Masih dilakukan perbaikan Annual Work Plan (AWP) dan pembukaan blokir anggaran ICARE sehingga penyerapan anggaran masih belum maksimal.

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 2,271,708,021 dan Rp 1,970,722,605. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2026 mengalami Kenaikan dari TA 2025. Perbandingan Belanja Pegawai

per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	Realisasi 30 Juni 2026	Realisasi 30 Juni 2025	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,761,903,099	1,717,591,576	+2,58
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	509,805,106	195,028,179	+161,40
Belanja Lembur	0	58,658,000	
Jumlah Belanja Kotor	2,271,708,205	1,971,277,755	
Pengembalian Belanja Pegawai	184	555,150	
Jumlah Belanja	2,271,708,021	1,970,722,605	+15,27

Realisasi belanja TA 2026 mengalami peningkatan sebesar Rp 300,985,416 apabila dibandingkan TA 2025. Peningkatan tersebut disebabkan antara lain :

1. Adanya kenaikan pangkat pada 3 pegawai yang mengakibatkan peningkatan pembayaran gaji dan tunjangan.
2. Adanya pengangkatan 8 pegawai dari CPNS menjadi PNS, sehingga terjadi penyesuaian besaran gaji dan hak-hak kepegawaianya.
3. Pemberian Kenaikan Gaji Berkala (KGB) kepada 10 pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga meningkatkan realisasi belanja pegawai

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 4,498,221,709 dan Rp 1,682,966,843.

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Barang Operasional	2,171,850,000	845,696,550	38.94	923,471,791
Belanja Barang Non Operasional	5,200,543,000	1,025,788,926	19.72	152,560,000
Belanja Barang Persediaan	2,350,427,000	1,508,627,000	64.19	0
Belanja Jasa	1,277,110,000	238,461,262	18.67	130,132,052
Belanja Pemeliharaan	840,815,000	577,960,297	68.74	476,803,000
Belanja Perjalanan Dinas	7,019,006,000	301,687,674	4.3	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada	10,000,000,000	0	0	0
Jumlah	28,859,751,000	4,498,221,709	15.59	1,682,966,843

Realisasi belanja barang TA 2026 mengalami peningkatan dari TA 2025. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya tambahan kegiatan pada Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas.
2. Meningkatnya alokasi anggaran kegiatan ICARE pada Tahun 2026

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Belanja Modal

per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	Realisasi 30 Juni 2026	Realisasi 30 Juni 2025	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	
Jumlah Belanja	0	0	

Realisasi belanja modal pada TA 2026 sama dengan TA 2025. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Kegiatan yang menghasilkan belanja modal masih berada pada tahap persiapan
2. Masih dilakukan perbaikan Annual Work Plan (AWP) dan pembukaan blokir anggaran

B.5.1. BELANJA MODAL TANAH

Realisasi Belanja Modal Tanah per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Perbandingan Belanja Modal Tanah
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2026	Realisasi 30 Juni 2025	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	0	0	
Pengembalian Belanja	0	0	
Jumlah Belanja	0	0	

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2026 sama dengan TA 2025. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Tidak ada anggaran Belanja Modal tanah

B.5.2. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2026	Realisasi 30 Juni 2025	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	
Jumlah Belanja	0	0	

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2026 sama dengan TA 2025. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Belum ada belanja modal peralatan dan mesin

B.5.3. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2026	Realisasi 30 Juni 2025	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	0	0	
Pengembalian Belanja	0	0	
Jumlah Belanja	0	0	

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2026 sama dengan TA 2025. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Belum ada belanja modal gedung dan bangunan

B.5.4. BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp 0.

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2026	Realisasi 30 Juni 2025	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	
Jumlah Belanja	0	0	

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2026 sama dengan TA 2025. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Belum ada belanja modal JIJ.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 180,000,000 dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 30 Juni 2026

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)
Saldo BP Kas (tunai dan Bank)	128,386
Saldo BP Uang Muka (Voucher)	178,874,214
Kuitansi UP yang belum SPM	997,400
Jumlah	180,000,000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal pelaporan sebesar Rp 180,000,000 merupakan saldo Uang Persediaan (UP) yang telah diganti melalui mekanisme Ganti Uang Persediaan (GUP) dan masih berada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran. Saldo tersebut merupakan kas yang belum digunakan atau belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal pelaporan.

C.1.2. Persediaan

Saldo Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 1,395,314,000 dan Rp 79,295,000. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Barang Konsumsi	418,490,000	0
Bahan untuk Pemeliharaan	37,111,000	0
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	42.530.000	42,530,000
Bahan Baku	233,215,000	0
Barang Persediaan Lainnya	663,968,000	36,765,000
Jumlah	1,395,314,000	79,295,000

Pada Semester I Tahun 2026, terdapat pengadaan barang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Sampai dengan 30 Juni 2026, sebagian barang tersebut masih belum digunakan atau belum disalurkan sehingga masih diakui sebagai persediaan. Rinciannya sebagai berikut

1. Kelompok barang konsumsi berupa paling banyak keperluan lapangan,
2. Bahan untuk pemeliharaan berupa paling banyak perabot kantor,
3. Bahan baku berupa paling banyak bahan kimia,
4. Barang persediaan lainnya berupa paling banyak obat padat.

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BRMP Sulawesi Tenggara per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 111,874,290,000 dan Rp111,874,290,000. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	111,874,290,000
Mutasi Tambah	
Pengembangan Melalui KDP	0
Saldo per 30 Juni 2026	111.874.290.000

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan tanah adalah berupa:

1. Tidak ada Mutasi tambah tanah melalui pengembangan KDP.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BRMP Sulawesi Tenggara per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 12,020,310,577 dan Rp 12,020,310,577. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	12,020,310,577
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Saldo per 30 Juni 2026	12,020,310,577

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Belum ada pengadaan peralatan dan mesin.

C.2.4. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BRMP Sulawesi Tenggara per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 23,591,972,900 dan Rp 23,591,972,900. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	23,591,972,900
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
Saldo per 30 Juni 2026	23.591.972.900

C.2.5. GEDUNG DAN BANGUNAN BELUM DIREGISTER

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Akun Gedung dan Bangunan Belum Diregister tersaji dalam Neraca SAIBA dikarenakan aplikasi SIMAK-BMN belum dapat mengirimkan data ke SAIBA untuk melakukan jurnal koreksi terhadap akun tersebut. Rincian Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Aset Gedung dan Bangunan Belum Diregister
per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	0
Jumlah	0	0

C.2.6. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BRMP Sulawesi Tenggara per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 2,281,746,700 dan Rp 2,281,746,700.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	2,281,746,700
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
Saldo per 30 Juni 2026	2.281.746.700

C.2.7. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN BELUM DIREGISTER

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Akun Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister tersaji dalam Neraca SAIBA dikarenakan aplikasi SIMAK-BMN belum dapat mengirimkan data ke SAIBA untuk melakukan jurnal koreksi terhadap akun tersebut. Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister
per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	0	0
Jumlah	0	0

C.2.8. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BRMP Sulawesi Tenggara per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp5.000.000 dan Rp5.000.000.

Saldo Awal 2026	5.000.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2026	5.000.000

C.2.9. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki BRMP Sulawesi Tenggara per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp1.316.454.414 dan Rp1.316.454.414. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Sampai dengan tanggal pelaporan, seluruh aset Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut sedang dalam proses usulan penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga belum terdapat perubahan nilai KDP yang disajikan dalam laporan keuangan. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.2.10. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BRMP Sulawesi Tenggara per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp -19,047,233,596 dan Rp -18,442,259,893.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan
1	Tanah	111,874,290,000	0
2	Peralatan dan Mesin	12,020,310,577	11,070,470,939
3	Gedung dan Bangunan	23,591,972,900	6,566,011,519
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,281,746,700	1,410,751,138
5	Aset Tetap Lainnya	5,000,000	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,316,454,414	0
	JUMLAH ASET TETAP	132,647,514,698	19,047,233,596

C.4.1. ASET LAINNYA

Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 59.665.000 dan Rp 59.665.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Aset Tak Berwujud	59,665,000
Aset Lain-lain	34,142,000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	43,727,000
Jumlah	50,080,000

C.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki BRMP Sulawesi Tenggara per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 34.142.000 dan Rp 34.142.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BRMP Sulawesi Tenggara serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BRMP Sulawesi Tenggara per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp -43,727,000 dan Rp -43,687,000.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2026, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	59,665,000	-9,585,000	50,080,000
2.	Aset Lain-lain	34,142,000	-34,142,000	0
Akumulasi Penyusutan		93.807.000	-43,687,000	50.120.000

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per (periode) 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 541,838,999 dan Rp 0. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp 541,838,999 apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per (periode) 2025. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per Semester I 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 2025

No	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	361,838,999	0	361,838,999
2	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0
3	Uang Muka Dari KPPN	180,000,000	0	180,000,000
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
Jumlah		541,838,999	0	541,838,999

C.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per (periode) 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 361,838,999 dan Rp 0. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per SEMESTER I 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp 361,838,999 apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per SEMESTER I 2025. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per SEMESTER I 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.30.1 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 2025

No	Uraian		30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	259,918,999	0	259,918,999
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Operasional	101,920,000	0	101,920,000
Jumlah			361,838,999	0	0

Saldo Utang Pihak Ketiga pada tanggal 30 Juni 2026 antara lain merupakan Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar. Utang tersebut timbul karena hak pegawai atas gaji dan tunjangan telah menjadi kewajiban pemerintah sampai dengan tanggal pelaporan, namun pembayaran baru akan direalisasikan pada periode berikutnya sesuai jadwal pembayaran yang berlaku. Serta terdapat Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar yaitu honorarium PNP/PPK Paruh Waktu yang haknya telah menjadi kewajiban pemerintah sampai dengan tanggal pelaporan, namun pembayarannya baru akan direalisasikan pada bulan Juli 2026 sesuai jadwal pembayaran yang berlaku.

C.5.2. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per (periode) 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 180,000,000 dan Rp 0. Saldo Uang Muka dari KPPN per SEMESTER I 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp 180,000,000 apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN per SEMESTER I 2025.

C. 6. EKUITAS

Saldo Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 133,126,174,404 dan Rp 132,776,929,698. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 26,804,456 dan Rp 13,454,400. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNB/ Lainnya
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	Realisasi 30 Juni 2026	Realisasi 30 Juni 2025	Naik (Turun) %
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	26,804,456	13,454,400	+99.22
Jumlah	26,804,456	13,454,400	+99.22

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 2,531,627,020 dan Rp 2,212,865,470. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai TA 2026 mengalami peningkatan sebesar Rp 318,761,550 apabila dibandingkan TA 2025. Peningkatan tersebut disebabkan antara lain :

1. Adanya kenaikan pangkat pada 3 pegawai yang mengakibatkan peningkatan pembayaran gaji dan tunjangan.
2. Adanya pengangkatan 8 pegawai dari CPNS menjadi PNS, sehingga terjadi penyesuaian besaran gaji dan hak-hak kepegawaiannya.
3. Pemberian Kenaikan Gaji Berkala (KGB) kepada 10 pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga meningkatkan realisasi belanja pegawai

Perbandingan Beban Pegawai per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	Realisasi 30 Juni 2026	Realisasi 30 Juni 2025	Naik (Turun) %
Beban Pegawai	2,531,627,020	2,212,865,470	+14.41
Jumlah	2,531,627,020	2,212,865,470	14.41

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 192,608,000 dan Rp 0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	Realisasi 30 Juni 2026	Realisasi 30 Juni 2025	Naik (Turun) %
Beban persediaan	192,608,000	0	
Jumlah	192,608,000	0	

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 2,211,866,738 dan Rp 1,319,563,843. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Dibandingkan dengan Tahun 2025, Beban Barang dan Jasa TA 2026 mengalami Kenaikan dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya tambahan kegiatan pada Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas.
2. Meningkatnya alokasi anggaran kegiatan ICARE pada Tahun 2026

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	Realisasi 30 Juni 2026	Realisasi 30 Juni 2025	Naik (Turun) %
Beban Barang dan Jasa	2,211,866,738	1,319,563,843	+67.62
Jumlah	2,211,866,738	1,319,563,843	+67.62

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 577,960,297 dan Rp 476,803,000. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	Realisasi 30 Juni 2026	Realisasi 30 Juni 2025	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan	577,960,297	476,803,000	+21.27
Jumlah	577,960,297	476,803,000	+21.27

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 301,687,674 dan Rp 0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka

pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	Realisasi 30 Juni 2026	Realisasi 30 Juni 2025	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan	301,687,674	0	
Jumlah	301,687,674	0	

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	Realisasi 30 Juni 2026	Realisasi 30 Juni 2025	Naik (Turun) %
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	
Jumlah	0	0	

Pada 30 Juni 2026 belum terdapat Bantuan yang diserahkan ke Masyarakat.

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar 0 dan Rp 622,915,038. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	Realisasi 30 Juni 2026	Realisasi 30 Juni 2025	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Amortisasi	605,013,703	622,915,038	-2.87
Jumlah	605,013,703	622,915,038	-2.87

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	Realisasi 30 Juni 2026	Realisasi 30 Juni 2025	Naik (Turun) %
Surplus/Defisit dari kegiatan Operasional	1,555,000	0	
Jumlah	1,555,000	0	

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026 dan 1 Januari 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 132,776,929,698 dan Rp 133,280,766,891.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp -6,392,403,976 dan Rp -4,618,470,351. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Aset persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 6,741,648,682 dan Rp 3,595,715,048. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.4.1. Kenaikan dan Penurunan Ekuitas

Kenaikan dan Penurunan Ekuitas Pada periode sampai dengan 30 Juni 2026 saldo dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 349,244,706 dan Rp -1,022,755,303.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 133,126,174,404 dan Rp 132,258,011,588.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

- Tidak ada peristiwa penting

F.2. Pengungkapan Lain-lain

- Pada Semester I Tahun 2026 terdapat transaksi pengembalian belanja yang seharusnya disetor sebesar Rp 15,007,500, namun dalam pelaksanaannya dilakukan penyetoran sebesar Rp 17,250,000, sehingga terjadi kelebihan setor sebesar Rp 2,242,500. Atas kelebihan setor tersebut, Satker telah mengajukan permintaan persetujuan SHR dan telah memperoleh persetujuan dengan catatan. Tindak lanjut atas permasalahan tersebut akan dilakukan melalui pengajuan permohonan pengembalian kelebihan setor kepada KPPN pada bulan periode semester berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Terdapat selisih di akun Pendapatan PNBPN pada Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp 1,476,592. Selisih tersebut atas Piutang Bukan Pajak senilai Rp 78,408 yaitu merupakan piutang atas sewa rumah dinas yang pembayarannya dilakukan melalui mekanisme pemotongan gaji induk. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2026, hak pemerintah atas penerimaan sewa telah diakui sebagai Piutang PNBPN, namun realisasi penerimaan dan penyetorannya ke kas negara baru dilakukan pada saat pembayaran gaji bulan Juli 2026. Serta Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp 1,555,000 yaitu pembayaran kekurangan

Tunjangan Kinerja (Tukin) pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2026.

- Sampai dengan Semester I Tahun 2026 masih terdapat anggaran kegiatan Program Strategis Kementan senilai Rp 2,516,790,000 yang belum direalisasikan karena alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut baru diterima pada 7 Juni 2026. Dengan demikian, jangka waktu pelaksanaan anggaran sampai dengan tanggal pelaporan belum mencapai satu bulan, sehingga pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran akan dilaksanakan pada periode semester berikutnya sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku.